

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian mengenai pengaruh *good governance*, akuntabilitas dan komitmen organisasi terhadap kinerja dinas pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Dinas yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Singkat Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibukota dari kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976, pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Sang Mutiara dari Priangan Timur itulah julukan bagi kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$ BT dan $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$ LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, maka terbentuklah 2 buah bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya, mulai di gulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya di pimpin oleh A. Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976 – 1981. Pada saat itu melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud. Walikota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa barat, H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. Suljana Wirata Hadisubrata (1996 – 2001), dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desan menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain :Kecamatan Tawang Kecamatan Cihideung Kecamatan Cipedes Kecamatan Indihiang Kecamatan Kawalu Kecamatan Cibeureum Kecamatan Mangkubumi Kecamatan Tamansari.

Berikut ini sktruktur dan urutan pemegang jabatan Walikotaif Tasikmalaya dari terbentuknya kota administratif sampai menjelang terbentuknya pemerintah KotaTasikmalaya.

Tabel 3.1
Walikota Tasikmalaya

Oman Roesman (1976-1985)	Yeng Partawinata (1985-1989)	R. Y. Wahyu (1989-1992)	Erdhi Hardhiana (1992-1999)	Bubun Bunyamin (1999-2007)	Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si (2007-2012)	Drs. H. Budi Budiman (2012-2017)
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------



Gambar 3.1
SOTK Kota Tasikmalaya

3.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

1. Visi

Berdasarkan Iman dan Taqwa, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing menuju masyarakat madani. Dimana visi ini mengandung makna sebagai berikut:

➤ Iman

Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga) makna yaitu tawadu (sikap rendah hati); qona'ah (sikap ikhlas); dan wara (sikap menjaga diri dan hati).

➤ Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan daya/kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara operasional kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan); intelektual (memiliki pola pikir kritis dan sistematis); dan manajemen komunikasi (kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/pelaku usaha).

Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek, bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Daya Saing

Daya saing adalah segenap kemampuan/daya tarik dalam membentuk atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/keterampilan masyarakat yang

mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan kinerja yang berkelanjutan.

➤ Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing

Kemandirian ekonomi yang berdaya saing adalah kemampuan dalam mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/kekuatan sendiri dengan tidak membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang terbuka dan terintegritas dengan perekonomian regional, nasional dan global.

➤ Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 3 (tiga) buah Misi Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat
- Mewujudkan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan

- Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya local.

3.1.3 Letak Geografis

Kota Tasikmalaya secara geografis terletak $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26'32''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 08'32'' - 108^{\circ} 24'02''$ Bujur Timur .

Batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, dan Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan.

3.1.4 Dinas Kota Tasikmalaya

Tabel 3.2
Dinas Kota Tasikmalaya

No	Nama Dinas
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Koperasi Usaha Mikro
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja
10	Dinas Pertanian dan Perikanan
11	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Ketahanan Pangan

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode korelasional. Menurut Ibrahim (2015:59) metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Sedangkan metode korelasional menurut Rus yang dikutip oleh Tuti (2015) adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih.

Sensus yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Fenomena tersebut secara empiris dilihat pada suatu unit analisis yang dalam penelitian ini adalah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi dari variabel menurut Sugiyono (2013:38) adalah : “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih yaitu “Pengaruh *Good Governance*, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Dinas Pemerintah”, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (*Independent variabel*)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:39).

Variabel Independent dalam penelitian ini adalah :

a. *Good Governance* (X_1) dengan indikator

- *Participation*
- *Rule of Law*
- *Transparancy*
- *Responsiveness*

- *Consensus Orientation*
- *Equity*
- *Efficiency and Effectiveness*
- *Accountability*
- *Strategic vision*

b. Komitmen Organisasi (X_2) dengan Indikator

- *Affective*
- *Continuance*
- *Normative*

2. Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*)

Variabel Tidak Bebas Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:39). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah

a. Kinerja Dinas Pemerintah (Y), dengan indikator :

- Capaian Output yang ada di RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran)
- Capaian Visi misi pemerintah daerahnya (RAPBD-RPJMD)
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengaruh Good Governance (X1)	Penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (<i>society</i>) (LAN dan BPKP 2001:6)	1 Participation (Keterlibatan Masyarakat) 2 Rule of Law (Penegakan hukum yang adil) 3 Transparency (Kebebasan memperoleh informasi) 4 Responsiveness (Cepat dan tanggap) 5 Consensus Orientation (Berorientasi pada kepentingan Masyarakat) 6 Equity (Kesempatan yang sama) 7 Efficiency and Effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas) 8 Accountability (Pertanggungjawaban Publik) 9 Strategic vision (Adanya visi ke depan)	Ordinal
Komitmen Organisasi (X2)	Sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan Luthans (2012:249)	1. <i>Affective</i> 2. <i>Continuance</i> 3. <i>Normative</i>	Ordinal
Kinerja Dinas Pemerintah (Y)	Kinerja (<i>performance</i>) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic	1. Capaian Output yang ada di RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) 2. Capaian Visi misi pemerintah daerahnya (RAPBD-RPJMD) 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Ordinal

planing suatu organisasi.

(Indra Bastian, 2006 : 274)

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Studi Kepustakaan.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui:
 - a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti
 - b. Kuisisioner, yaitu daftar isi terstruktur yang diajukan oleh penulis kepada responden yang berhubungan erat dengan topik permasalahan, kuisisioner yang penulis ajukan mengacu pada aspek yang diteliti dari variabel independen dan dependen.
 - c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mempelajari tentang keadaan. Langkah ini dilakukan guna memperoleh data dari Dinas Kota Tasikmalaya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan kuisisioner
2. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.2.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data:

1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu Dinas di Kota Tasikmalaya

2. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain dari data di Dinas Kota Tasikmalaya): sumber literature, hasil publikasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda- benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu. (Sugiyono, 2013:80)

Dalam rangka mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan membagikan kuesioner yang berupa formulir secara tertulis beserta pilihan jawaban kepada sekretaris atau staff yang ada di Kota Tasikmalaya serta wawancara kepada pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Tabel 3.4
Populasi Penelitian

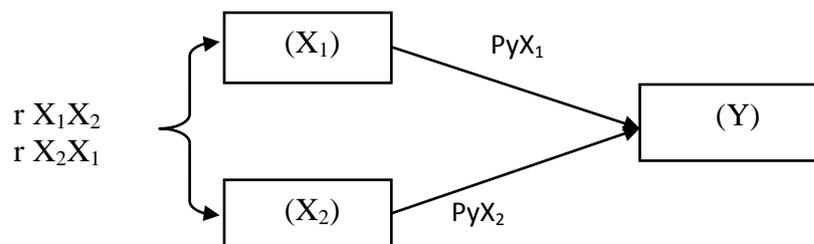
No	Nama Dinas	Alamat
1	Dinas Pendidikan	Kompleks Perkantoran Kota Tasikmalaya, JL. Ir. H. Juanda, Linggajaya, Mangkubumi, Tasikmalaya , Jawa Barat 46181 (0265) 312044
2	Dinas Kesehatan	Komplek Perkantoran, Jl. Insinyur H. Djuanda, Cipedes, Panyingkiran, Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 (0265) 342437
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Cibalanarik No.55, Sukapura, Sukaraja, Tasikmalaya, Jawa Barat 46183
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jl. Noenoeng Tisnasaputra no 5 Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, West Java 46115 (0265) 314100
5	Dinas Koperasi Usaha Mikro	Komplek Perkantoran, Jalan Ir. H. Djuanda, Cipedes, Bantarsari, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46133 (0265) 342571
6	Dinas Perhubungan	Jl. Ir. H. Juanda No.191, Sukamulya, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 (0265) 325187
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Insinyur Haji Juanda, Indihiang, Panyingkiran, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 (0265) 33381
8	Dinas Sosial	Jl. Siliwangi No.73, Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115 (0265) 313997
9	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Siliwangi No.73, Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115 (0265) 313997
10	Dinas Pertanian dan Perikanan	Jl. Leuwi Dahu No. 85, Panyingkiran, Indihiang, Parakannyasag, Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 (0265) 313024
11	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Otista No.4, Empangsari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46121 (0265) 314376
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Komplek Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun No.1, Bungursari, Sukarindik, Bungursari, Sukarindik, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 (0265) 31437
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Yudanegara No.75A, Argasari, Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat 46121 (0265) 340212

14	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Noenoeng Tisnasaputra no 5 Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, West Java 46115 (0265) 314100
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Komplek Perkantoran, Jl. Ir. H. Juanda, Sukamulya, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 (0265) 342610
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Ir. H. Juanda No.191, Sukamulya, Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151
17	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Gunungjati I , Kahuripan, Tawang, Jawa Barat 46124 (0265) 7524093

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berkaitan dengan *good governance* dan komitmen organisasi terhadap kinerja dinas pemerintah kota Tasikmalaya.

3.3 Model/ Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menghubungkan antara variable yang akan diteliti yang sekaligus akan mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistic yang digunakan. Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh *Good Governance*, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Dinas Pemerintah”. Maka paradigma penelitiannya adalah:



Gambar 3.2
Paradigma Penelitian

Keterangan :

X_1 : *Good Governance*

X_2 : Komitmen Organisasi

Y : Kinerja Dinas Pemerintah

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Dinas Pemerintah.

3.4.1 Analisis Terhadap Kuesioner

Untuk memperoleh data yang akan dianalisis atas kedua variabel tersebut dalam penelitian ini akan digunakan daftar pernyataan, dari setiap pernyataan yang dimiliki pilihan jawaban responden, bentuk jawaban bernotasi / huruf S, J, SJ, P, dan TP dengan penilaian skor 5-4-3-2-1 untuk pernyataan positif.

Skor tersebut didasarkan skala likert dengan pernyataan terstruktur sehingga akan mendekati harapan jawaban akan semakin tinggi nilai skor (Sofian Masri 2003: 111). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Nilai, Notasi dan Predikat Pernyataan

Nilai	Notasi	Predikat
5	S	Selalu
4	J	Jarang
3	SJ	Sangat Jarang
2	P	Pernah
1	TP	Tidak Pernah

3.4.2 Analisis Deskriptif

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari penelitian, maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Untuk kelengkapan analisis dalam penelitian ini maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengukuran dengan presentase dan skoring, dengan menggunakan rumus Sugiyono (2007: 152) sebagai berikut:

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah persentase jawaban

F = Jumlah jawaban frekuensi

N = Jumlah responden

Setelah diketahui jumlah nilai tertinggi dari keseluruhan indikator maka dapat ditentukan interval perinciannya, sebagai berikut:

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pertanyaan}}$$

Keterangan:

NJI : Nilai jenjang interval adalah interval untuk menentukan tinggi sekali tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, suatu variabel.

- 2) Metode *Successive Interval*

Setelah dilakukan analisis instrumen penelitian dan jika *instrument* penelitian tersebut *valid*, *reliable* dan konsisten, selanjutnya nilai jawaban responden diubah skalanya menjadi skala pengukuran interval dengan menggunakan metode *successive Interval*. (Harun Al-Rasyid, 2005: 131). Proses

perhitungan transformasi data ordinal ke interval akan menggunakan bantuan program *Microsoft Excel versi 2007*.

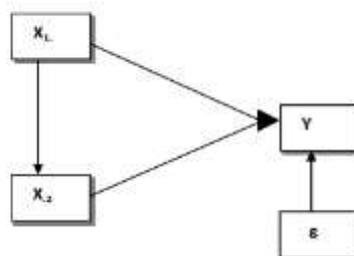
3.4.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis statistik yang digunakan adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*). Dalam Pengolahan Data Penelitian ini digunakan *software SPSS 21.0* dengan analisis statistik sebagai berikut:

1. Membuat diagram jalur

Simbol X merupakan lambang variabel bebas (independent) yang terdiri dari dua sub variabel: X_1 , X_2 dan simbol Y merupakan lambang variabel terikat (dependent). X_1 , X_2 berpengaruh positif secara parsial dan kumulatif terhadap Y. Disamping variabel-variabel tersebut, masih ada satu variabel residu yang diberi simbol ϵ .

Diagram di atas menunjukkan bahwa hubungan antara X_1 dengan X_2 , X_1 dengan Y, X_2 dengan Y adalah hubungan kausalitas.



Gambar 3.3
Diagram Jalur

2. Menghitung matrik korelasi

	X1	X2	...	X _k	
r _{X1X1}		r _{X1X2}	r _{X1X_k}	X ₁
		r _{X2X2}	r _{X2X_k}	X ₂
			r _{X_kX_k}	X _k

Gambar 3.4
Matrik Korelasi

3. Menghitung matrik invers korelasi

	X1	X2	X _k	
CR ₁₁		CR ₁₂	CR _{1_k}	X ₁
		CR ₂₂	CR _{2_k}	X ₂
			CR _{k_k}	X _k

Gambar 3.5
Invers Korelasi

4. Menghitung nilai koefisien determinasi seluruh sub variabel X terhadap Y
Menghitung koefisien determinasi multiple $R^2_{YX_1, \dots, X_k}$ dan koefisien detrminasi multiple Y dengan X_1, \dots, X_k , tanpa X_{X_i} , dengan formula:

$$R^2_{YX_1, \dots, X_k} = 1 - \frac{1}{CR_{yy}}$$

5. Menguji Keberartian Koefisien korelasi

Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antar variabel kuat. Demikian, jika hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil, besarnya koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut:

koefisien korelasi dilakukan dengan langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. Menentukan rumusan hipotesis statistik yang sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu:

Ho : koefisien korelasi tidak signifikan

Ha : koefisien korelasi signifikan

- b. Menentukan taraf nyata $\alpha = 5\%$ dan

$$dk = n - 2$$

- c. Menentukan data menghitung uji statistik yang digunakan dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

- d. Membandingkan nilai t yang diperoleh terhadap nilai ttabel dengan kriteria:

jika nilai thitung t tabel maka Ho ditolak.

- e. Membuat kesimpulan.

6. Menghitung pengaruh secara proporsional

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh langsung

$$Y \longleftarrow X_i \longrightarrow Y = \rho_{Y X_i} \rho_{Y X_i}$$

Pengaruh tidak langsung

$$Y \longleftarrow X_i \text{ } \Omega \text{ } X_j \longrightarrow Y = \rho_{Y X_i} r_{Y X_i} \rho_{Y X_j}$$

Tabel 3.6
Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

No.	Nama Variabel	Formula	
1.	<i>Good Governance</i> (X_1): Pengaruh Langsung X_1 terhadap Y	$(\rho_{YX_1})^2$	A
	Pengaruh Tidak Langsung X_1 melalui X_2 terhadap Y	$(\rho_{YX_1}) (r_{X_1X_2}) (\rho_{YX_2})$	B
Total Pengaruh X_1 terhadap Y		A + B	C
2.	Komitmen Organisasi (X_2): Pengaruh Langsung X_2 Terhadap Y	$(\rho_{YX_2})^2$	D
	Pengaruh Tidak Langsung X_2 Melalui X_1 terhadap Y	$(\rho_{YX_2}) (r_{X_2X_1}) (\rho_{YX_1})$	E
Total Pengaruh X_2 terhadap Y		D + E	F
Total Pengaruh X_1, X_2 terhadap Y secara simultan		C+F	G
Pengaruh Lain		100% - G	(H)
Total		G+H	I